

# JENDELA

## Pendidikan dan Kebudayaan

LIV/JULI - 2021

**09** Menuju Pembelajaran Berkualitas selama Pandemi

**12** Semangat Vaksin untuk Sambut Siswa Kembali ke Sekolah

**19** Bantuan Kuota Data Internet Dilanjutkan

**Ikhtiar untuk  
Tak Putus Asa Belajar  
di Tengah Pandemi**



# DAFTAR ISI

## 04 Salam Mas Mendikbudristek

## 06 Sekilas Kemendikbudristek

### FOKUS

- 09** Dorong Pembelajaran Tatap Muka  
**Menuju Pembelajaran Berkualitas selama Pandemi**
- 12** Target Tuntas hingga Juni 2021  
**Semangat Vaksin untuk Sambut Siswa Kembali ke Sekolah**
- 16** Relaksasi Dana BOS  
**Bisa Digunakan untuk Beli Gawai Hingga Perlengkapan Protokol Kesehatan**
- 19** Menjawab Respons Positif Masyarakat  
**Bantuan Kuota Data Internet Dilanjutkan**
- 22** Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19  
**Ini Dia, Alat Bantu Sekolah Terjemahkan SKB 4 Menteri**
- 25** Tayangan Belajar Dari Rumah,  
**Sarana Penunjang Pembelajaran Jarak Jauh**

**28** OPINI  
Komarudin  
**Rektor Universitas Negeri Jakarta Penerapan PTM Terbatas Harus dengan Persiapan dan Prokes Ketat**

**30** RESENSI  
**Persempit Kesenjangan antara 2 Generasi Berbeda**

**31** INFOGRAFIS PERPUSTAKAAN  
**Pengembalian Koleksi Perpustakaan di Masa Pandemi Covid-19**

**32** SEPUTAR DUNIA PERFILMAN INDONESIA  
Ustadz Jaga Jarak  
**Lika Liku Berdakwah di Tengah Pandemi**

**35** KEBUDAYAAN  
Kemah Budaya Kaum Muda  
**Majukan Desa dengan Inovasi**

**38** KAJIAN  
**Harapan dan Tantangan Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan di Indonesia**

**41** BANGGA BERBAHASA INDONESIA  
**Ungkapan dengan Nama Hewan**

**42** BANGGA BERBAHASA INDONESIA  
**Senarai Padanan Kata**

Pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang terselenggara akibat pandemi Covid-19 telah berjalan hampir satu tahun lamanya. Dampak negatif, seperti putus sekolah, ancaman *learning loss* mulai dirasakan. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus berupaya membuat kebijakan yang dapat membantu sekolah dan pemerintah daerah untuk menyiapkan diri menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas secara bertahap.

Misalnya saja dengan mendukung program vaksinasi dengan menyediakan data pendidik dan tenaga kependidikan seluruh Indonesia. Target pemerintah agar program ini dapat tuntas hingga Juli 2021 dipermudah dengan ketersediaan data tersebut. Kemudian, kebijakan berupa relaksasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dapat digunakan untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan PTM terbatas dengan protokol kesehatan ketat.

Dua contoh kebijakan tersebut hanya sebagian kecil dari ikhtiar Kemendikbudristek dalam mendorong sekolah menggelar PTM terbatas. Sajian artikel lengkap redaksi hadirkan pada edisi kali ini di rubrik **Fokus**. Tidak lupa pula *Jendela* tampilkan pendapat dari praktisi pendidikan mengenai kebijakan yang dilakukan Kemendikbudristek ini.

Selanjutnya pada rubrik **Resensi Buku**, redaksi sungguhnya ulasan singkat buku berjudul “Mengajar Generasi Z”. Buku setebal 160 halaman ini memberikan solusi dalam mempersempit kesenjangan antara guru dan siswa yang berasal dari generasi Z dari sektor pedagogik. Simak penjelasan lebih lengkap pada edisi ini di halaman 30.

Sementara itu, pada rubrik **Seputar Film Indonesia** kali ini, *Jendela* menghadirkan ulasan tentang serial drama

“Ustadz Jaga Jarak”. Drama yang dibintangi almarhum Ade Firman Hakim ini erat kaitannya dengan pandemi Covid-19. Bagaimana cerita yang dikisahkan dalam drama ini? Baca artikelnya di halaman 32 dan 33.

Pada rubrik **Kebudayaan**, pembaca dapat menyimak artikel tentang program yang ditujukan untuk membangun desa lewat pendekatan teknologi, sains, seni, matematika, dan teknik. Kegiatan yang diberi nama “Kemah Budaya Kaum Muda” ini bertujuan mencari inisiatif kaum muda supaya kebudayaan Indonesia siap menghadapi tantangan masa depan.

Di rubrik **Kajian**, ada suguhan artikel dari hasil studi tentang pro dan kontra sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Indonesia. Studi ini bertujuan mengkaji secara komprehensif latar historis penerapan sistem zonasi di beberapa negara, tujuan, keuntungan dan tantangan, serta solusi mengatasi persoalan penerapan sistem zonasi. Simak artikel lengkapnya pada halaman 38 s.d. 40.

Terakhir, rubrik yang juga tidak boleh dilewatkan ada **Bangga Berbahasa Indonesia** yang kali ini menyajikan artikel ringan nan berwawasan, berupa ungkapan dengan nama hewan. Apa saja ungkapan tersebut, arti, dan bagaimana penggunaannya dalam kalimat? Simak di halaman 41. Pada halaman 42, pembaca akan temui senarai kata serapan yang diambil dari berbagai bahasa di dunia.

Redaksi ucapkan terima kasih atas dukungan para pembaca setia *Jendela* sehingga majalah ini dapat terbit untuk menjadi referensi serta tambahan informasi mengenai kebijakan Kemendikbudristek. Jangan lupa untuk ikuti akun media sosial *Jendela* di Facebook Majalah Jendela Dikbud. Tinggalkan jejak dengan berkomentar pada salah satu unggahan. Akhir kata, selamat membaca dan ambil manfaat dari artikel-artikel yang tersaji.

## Redaksi

## REDAKSI

### Pelindung:

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim

**Penasihat:** Sekretaris Jenderal, Ainun Na'im

**Pengarah Konten:** Staf Khusus Mendikbudristek, Muhamad Heikal

**Penanggung Jawab:** Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Hendarman

**Pemimpin Redaksi:** Anang Ristanto

**Redaktur Pelaksana:** Ratih Anbarini

**Staf Redaksi:** Agi Bahari, Desliana Maulipaksi, Ryka Hapsari Putri, Dwi Retnawati, Denty Anugrahmawaty, Anang Kusuma, Prani Pramudita, Dennis Sugianto, Nur Widiyanto, Lany Fitriana, Aline Rogeleonick

**Editor:** Ratih Anbarini, Aline Rogeleonick

**Sekretariat:** Sigit Supriyadi, Heri Nana Kurnia

**Fotografi, Desain & Artistik:** BKLM

### Sekretariat Redaksi

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kemendikbudristek, Gedung C Lantai 4, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, Telp. 021-5711144 Pes. 2413



- kemdikbud.go.id
- Kemdikbud.RI
- @kemdikbud\_RI
- KEMENDIKBUD RI
- Kemdikbud.RI
- Kemdikbud.RI
- jendela.kemdikbud.go.id

# Salam Mas Mendikbudristek

Sudah lebih dari satu tahun kita menghadapi bersama situasi pandemi yang telah mengubah begitu banyak aspek dari kehidupan kita, termasuk pendidikan. Kebijakan pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) diambil sebagai cara untuk memastikan anak-anak kita tetap mendapatkan pendidikan, saat pertemuan langsung di sekolah tidak memungkinkan untuk dilakukan.

Kami paham betul, PJJ tidak sepenuhnya dapat diselenggarakan secara efektif karena terkendala sarana dan prasarana. Untuk itu, kami dorong kebijakan-kebijakan yang dapat mendekatkan upaya kita semua untuk dapat menggelar kembali pembelajaran secara tatap muka (PTM). Tentu hal ini perlu dilakukan secara hati-hati, penuh pertimbangan, bertahap, terbatas, dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kejadian Covid-19, serta kebijakan daerah serta pusat.





Kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan telah dan akan terus menjadi pertimbangan utama kami dalam mengupayakan PTM Terbatas. Sejak Maret 2021, Kemendikbudristek telah menjalin kerja sama dengan Kemenkes, Kemendagri, dan Kemenag untuk mengatur akselerasi PTM Terbatas melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri. Sejak program vaksinasi Covid-19 dimulai, kami juga telah mendorong prioritas vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Sebelum melakukan PTM Terbatas, sekolah harus melengkapi daftar periksa yang berisi pemenuhan kebutuhan protokol kesehatan. Tahun lalu, kami telah mengeluarkan kebijakan relaksasi dana BOS, sehingga pemenuhan kebutuhan protokol kesehatan dapat dianggarkan melalui dana BOS.

Sekolah dapat mengatur jadwal masuk peserta didik sesuai dengan kemampuan, di samping menyediakan opsi PJJ. Dengan pilihan tersebut, orang tua dapat memutuskan bagi anaknya untuk melakukan PTM Terbatas atau tetap melaksanakan PJJ. Oleh karena itu, kami tetap menayangkan program Belajar dari Rumah melalui kanal YouTube TVEdukasi di samping menyediakan materi pembelajaran melalui platform Rumah Belajar untuk terus memompa semangat peserta didik, guru, dan orang tua. Kebijakan melanjutkan bantuan kuota internet juga dilakukan guna mendukung PJJ.

Dalam situasi apapun, kami berupaya untuk senantiasa menghadirkan ruang dan situasi yang aman, sehat, dan nyaman untuk anak-anak Indonesia. Mari tetap semangat, serentak bergerak wujudkan Merdeka Belajar! (\*)

28/6  
2021

## Kemendikbudristek Bantu Rumah Sakit di Jakarta



**M**elihat gentingnya situasi Covid-19, khususnya di Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyalurkan bantuan 50 tenda di 50 Instalasi Gawat Darurat rumah sakit sejak tanggal 23 Juni 2021. Tenda-tenda tersebut merupakan hibah dari kerja sama Kemendikbudristek dengan UNICEF yang bertujuan untuk membantu Pemerintah Provinsi DKI dalam penanganan Covid 19.

“Kita coba membantu dan mengakomodir adanya permintaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membutuhkan ruang darurat tambahan untuk penanganan pasien Covid-19. Tenda-tenda tersebut kami salurkan ke rumah sakit yang membutuhkan,” terang Dirjen Jumeri, di Jakarta, Senin (28/06).

Proses pengiriman tenda dikoordinasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 DKI Jakarta yang telah disesuaikan juga berdasarkan permintaan rumah sakit rujukan Covid-19. Proses pengiriman tenda tersebut disalurkan dari LPMP DKI Jakarta. Pendirian tenda di rumah sakit dilakukan secara bertahap oleh Kemendikbudristek, BPBD DKI Jakarta, Jaya Konstruksi dan pihak rumah sakit yang dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama, Kemendikbudristek menyalurkan tenda darurat di 19 rumah sakit, tahap kedua ke 11 rumah sakit, dan diakhiri dengan tahap ketiga dengan jumlah 20 rumah sakit. **(AIKO, sumber: kemdikbud.go.id)**

30/6  
2021

## Mendikbudristek Berbincang Santai dengan Para Pengajar BIPA

**M**enteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim berbincang kasual dengan para pengajar Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) secara virtual, Rabu (30/6). Hal ini dilakukannya untuk mengapresiasi para pengajar BIPA, khususnya yang berkiprah di luar negeri atas dedikasi dan kinerja mereka mengembangkan bahasa Indonesia. Diskusi santai yang diberi tajuk “Mas Menteri Ngobrol dengan Pengajar BIPA” tersebut dihadiri sekitar 500 peserta yang meliputi pengajar dan pegiat BIPA, pembelajar BIPA, pejabat perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, serta masyarakat umum yang mendaftar secara daring.

Menteri Nadiem menilai, budaya, sejarah, dan kebinekaan Indonesia merupakan kekayaan luar biasa yang tidak dimiliki negara lain. Ia mengapresiasi kenaikan minat warga asing belajar bahasa Indonesia di masa pandemi ini. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, E. Aminudin Azis, juga menilai, pengajar BIPA adalah duta bahasa negara. “Keberadaan, peran, dan pengaruh mereka, apa pun kewarganegaraannya



patut untuk diapresiasi dan terus dimotivasi, dan pelaksanaan dialog ini bertujuan untuk memperluas, serta memperkuat jejaring kemitraan program BIPA melalui kontribusi pengajar BIPA, baik di dalam maupun luar negeri,” tuturnya.

Pada periode 1 Januari—30 April 2021, Kemendikbudristek telah menugaskan 36 pengajar untuk memfasilitasi 61 lembaga di 24 negara. Aminudin menambahkan, di antara pengajar yang ditugaskan tersebut, terdapat 73 pengajar lokal BIPA yang merupakan warga negara asing dan diaspora Indonesia. BIPA dimulai pada 2015 dan hingga 2020, sebanyak 370 pengajar telah bertugas mengajar 79.791 pemelajar BIPA di 206 lembaga pada 30 negara di seluruh dunia. **(RUTH, sumber: kemdikbud.go.id)**

24/6  
2021

## Kerja Sama untuk Kuatkan Literasi Media Sosial Pelajar SMP

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama dengan Twitter menjalin kerja sama “Penguatan Literasi Media Sosial”. Program ini ditujukan bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama, di mana usia siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah usia awal pengguna media sosial.

Acara penandatanganan dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Ainun Na'im dengan *Chief Representative* Twitter Asia Pasific di Jakarta, Agung Yudhawirana secara daring di Jakarta (24/6).

Ainun Na'im menilai, edukasi penggunaan media sosial bagi siswa usia SMP merupakan inisiasi baik dan selaras dengan penanaman nilai-nilai karakter Pelajar Pancasila. “Bijak dalam menggunakan media sosial sejak dini turut membentuk karakter yang baik, terutama dalam membiasakan diri berpikir kritis, kreatif, dapat bekerja sama, menghargai diri



sendiri dan orang lain, serta memiliki empati,” terangnya.

Kolaborasi ini, lanjut Ainun, akan menghasilkan silabus dan modul pembelajaran, serta edukasi literasi media sosial bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan jenjang SMP. Kemendikbudristek mengapresiasi dukungan pihak swasta dalam gotong royong memajukan pendidikan nasional. **(YURIKE, sumber: kemdikbud.go.id)**

03/6  
2021

## Kemendikbudristek Gelar Lomba Inovasi Musik Nusantara 2021

Sebagai langkah memajukan pengembangan musik Nusantara, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama Yayasan Atma Nusantara Jati (Atsanti Foundation) menggelar Lomba Inovasi Musik Nusantara (Linmtara) 2021. Melalui Linmtara, Kemendikbudristek mengajak pegiat musik untuk berinovasi dan berkreasi terhadap musik tradisi sebagai bentuk pelestarian budaya bangsa di tengah tantangan zaman yang semakin dinamis.

Rangkaian kegiatan Linmtara 2021 yang diinisiasi dan difasilitasi Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru (PMMB) Kemendikbudristek diawali dengan acara webinar yang mengangkat tema “Eksistensi Musik Nusantara dalam Perspektif Konservasi dan Inovasinya” pada Kamis (1/7). Sementara itu pendaftaran lomba dibuka pada 1 Juli hingga 31 Agustus 2021 di laman [linmtara.com](http://linmtara.com).

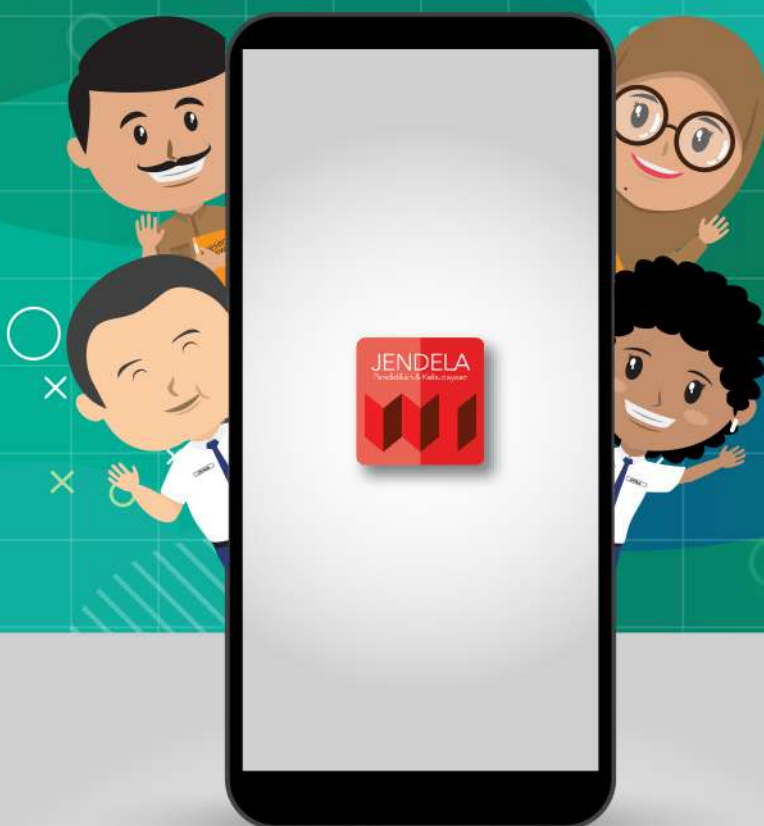
Ada lima tema yang dapat dikreasikan oleh peserta lomba, yaitu (1) Keagungan Peradaban dan Kebudayaan Nusantara; (2) Cinta Tanah Air; (3) Keberagaman; (4) Gotong Royong; dan (5) Keindahan



Alam Indonesia. Tema-tema ini berangkat dari representasi nilai-nilai relief Borobudur yang dapat diterjemahkan melalui musik Nusantara. Hal ini karena Candi Borobudur merupakan monumen masa lalu yang menjadi bukti tentang kehebatan ilmu pengetahuan dan teknologi arsitektur bangsa Indonesia.

Adapun juri lomba terdiri atas musisi, mulai dari Dwiki Dharmawan, Balawan, Peni Candra Rini, Anon Suneko, Uyau Moris, dan Ridho Hafiedz. Para peserta dengan karya inovasi musik Nusantara terbaik nantinya berkesempatan mendapat hadiah masing-masing sebesar Rp21 juta untuk 10 karya terbaik, serta Rp10 juta untuk satu karya favorit warganet. **(RAN, sumber: kemdikbud.go.id)**

Unduh aplikasi majalah JENDELA  
melalui **Play Store** dan **App Store**  
secara **GRATIS**



<http://bit.ly/majalahjendela>

<https://bit.ly/MajalahJendela>



[kemdikbud.go.id](http://kemdikbud.go.id)



[jendela.kemdikbud.go.id](http://jendela.kemdikbud.go.id)



Majalah Jendela Dikbud



Kemdikbud.RI



Kemdikbud\_RI



kemdikbud.ri



KEMENDIKBUD RI



kemdikbud ri





Dorong Pembelajaran Tatap Muka

## Menuju Pembelajaran Berkualitas selama Pandemi

**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus mendorong pemerintah daerah dan sekolah untuk secara bertahap dan terbatas menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi Covid-19. Sejumlah kebijakan untuk mendorong hal ini dilakukan sehingga diharapkan mengurangi dampak negatif pandemi terhadap psikologi perkembangan anak dan *learning loss*.**

**S**ejak tahun lalu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mendorong agar pemerintah daerah dan sekolah dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka secara bertahap dan terbatas. Bertahap berarti dilakukan dengan perlahan dan tidak serentak karena perlu disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Sementara terbatas, artinya membatasi jumlah siswa yang dapat menerima pembelajaran di dalam kelas.

Upaya tersebut dimulai dengan kebijakan yang membantu sekolah dalam menyiapkan diri untuk menggelar pembelajaran tatap muka. Misalnya dengan merelaksasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dapat sekolah gunakan untuk menyediakan alat-alat untuk penerapan protokol kesehatan, seperti sarana cuci tangan, sabun, alat tes suhu tubuh, hand sanitizer, dan lainnya.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri,

dan Menteri Kesehatan juga mengeluarkan keputusan bersama (SKB) mengenai panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi Covid-19. Keputusan ini disampaikan pada 15 Juni 2020 secara virtual. SKB ini mengatur penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan syarat hanya untuk zona hijau.

Selang beberapa waktu, pada 7 Agustus 2020, pemerintah melakukan penyesuaian keputusan bersama tersebut. Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pembelajaran, berbagai masukan dari para ahli dan organisasi serta evaluasi implementasi SKB Empat Menteri. Dalam SKB yang disesuaikan itu, pelaksanaan pembelajaran disebutkan hanya dapat dilakukan di zona selain merah dan oranye, yaitu zona kuning dan hijau. Meski diizinkan,

Sejak tahun lalu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mendorong agar pemerintah daerah dan sekolah dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka secara bertahap dan terbatas.

pembelajaran tatap muka dilakukan dengan terbatas dan tetap melaksanakan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Selanjutnya pada 20 November 2020, pemerintah kembali mengumumkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun

Pemerintah senantiasa mengkaji kebijakan pembelajaran pada masa pandemi sesuai dengan konteks perkembangan pandemi dan kebutuhan pembelajaran

Prinsip penyelenggaraan pendidikan selama pandemi COVID-19 adalah

Kesehatan dan keselamatan prioritas utama dalam penetapan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan

Mempertimbangkan tumbuh kembang dan hak anak selama pandemi COVID-19



Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19. Dalam SKB tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan penguatan peran pemerintah daerah/kantor wilayah (kanwil)/ kantor Kementerian Agama (Kemenag) sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya. SKB ini memperbolehkan PTM bagi

**Tidak berhenti dengan menyusun panduan, pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek juga melanjutkan bantuan kuota data internet untuk membantu pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang masih dilakukan di banyak daerah.**

satuan pendidikan yang memenuhi semua syarat berjenjang jika telah mendapat izin dari pemerintah daerah, tanpa melihat zonasi.

Sementara di tahun 2021, SKB untuk mendorong pemerintah daerah dan sekolah menggelar pembelajaran tatap muka secara bertahap dan terbatas disampaikan pada 30 Maret 2021. Kebijakan ini dikeluarkan mengingat pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) di satuan pendidikan telah mendapatkan vaksinasi Covid-19. Untuk itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah mewajibkan sekolah untuk (1) memberikan layanan PTM terbatas; dan (2) memberikan layanan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Namun demikian, satuan pendidikan yang sudah ataupun dalam proses melakukan PTM terbatas walaupun PTK-nya belum divaksinasi tetap diperbolehkan melakukan PTM terbatas selama tetap mengikuti protokol kesehatan dan sesuai izin pemerintah daerah.

## Lanjutkan Bantuan Lainnya

Tidak berhenti dengan menyusun panduan, pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek juga melanjutkan bantuan kuota data internet untuk membantu pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang masih dilakukan di banyak daerah. Bantuan ini merupakan jawaban atas respons positif yang disampaikan masyarakat akan manfaat yang diperoleh melalui kuota data internet.

Berdasarkan masukan masyarakat, keseluruhan bantuan kuota data internet di tahun 2021 ini merupakan jenis kuota umum. Kuota umum tersebut

dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman (kecuali yang diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika) dan yang tercantum pada laman <http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id>. Sebelumnya pada tahun 2020, jenis kuota dibagi menjadi dua, yaitu kuota belajar dan kuota umum dengan peruntukan dan akses yang berbeda.

Hal lain yang juga dilakukan pemerintah dalam membantu pembelajaran selama pandemi adalah dengan membuat tayangan Belajar dari Rumah yang ditayangkan di TVRI dan TV Edukasi. Belajar dari Rumah merupakan upaya Kemendikbudristek membantu terselenggaranya pendidikan bagi semua kalangan masyarakat di masa darurat Covid-19, khususnya membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan pada akses internet, baik karena tantangan ekonomi maupun letak geografis.

Belajar dari Rumah yang dimulai sejak 13 April 2020 itu terus berlanjut di 2021. Program ini merupakan respons cepat Kemendikbudristek terhadap masukan Komisi X DPR RI pada Rapat Kerja tanggal 27 Maret 2020 yang lalu. Hal ini, dikatakan Menteri Nadiem sejalan dengan semangat Merdeka Belajar. Adapun konten atau materi pembelajaran yang disajikan fokus pada peningkatan literasi, numerasi, serta penumbuhan karakter peserta didik. Kemendikbudristek juga akan melakukan monitoring dan evaluasi mengenai program ini bersama dengan lembaga nonpemerintah.

## Program Vaksinasi

Kemendikbudristek bersama Kementerian Kesehatan melaksanakan pula program vaksinasi bagi guru dan tenaga kependidikan (GTK). Pelaksanaan vaksinasi perdana bagi GTK ini dilakukan pada 24 Februari 2021 yang disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Saat itu sebanyak 650 GTK serta perwakilan asosiasi organisasi profesi guru menerima vaksinasi. Vaksinasi tahap kedua dilakukan pada 11 Maret 2021.

Program ini ditargetkan dapat diberikan kepada lima juta GTK hingga Juni 2021. PTK sebagai pelayan publik diprioritaskan mendapatkan vaksinasi Covid-19 di tahap kedua program vaksinasi nasional. Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, vaksinasi Covid-19 bagi PTK diharapkan mampu mengakselerasi persiapan PTM secara terbatas pada tahun ajaran baru 2021/2022. **(RAN)**



Target Tuntas hingga Juni 2021

## Semangat Vaksin untuk Sambut Siswa Kembali ke Sekolah

**Presiden Joko Widodo mengamanatkan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) sebagai pelayanan masyarakat untuk mendapat prioritas kedua setelah tenaga kesehatan untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19. Hal ini untuk menjaga layanan publik di sektor pendidikan dan kebudayaan tetap berjalan dengan maksimal. Target hingga Juni 2021, seluruh PTK termasuk dosen yang berjumlah 5.057.582 orang mendapat vaksin Covid-19.**

Untuk itu, pada 24 Februari 2021, pemerintah telah melakukan vaksinasi perdana kepada 650 pendidik dan tenaga kependidikan. Selain para guru, turut divaksinasi perwakilan dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Guru Indonesia (IGI), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI).

Selanjutnya ada dari Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu), Forum Guru Muhammadiyah, Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, Majelis Nasional Pendidikan Katolik, Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI), Asosiasi Guru Seni Budaya Indonesia (AGSBI), dan asosiasi profesi guru lainnya.

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim serta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin secara langsung menyaksikan pemberian vaksin perdana Covid-19 yang berlangsung di SMA Negeri 70 Jakarta.

Proses vaksinasi ini diselenggarakan secara bertahap kepada PTK di seluruh jenjang pendidikan pada satuan pendidikan negeri dan swasta, baik itu formal maupun non-formal hingga pendidikan keagamaan. Tahap pertama diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di PAUD/RA/ sederajat, SD/MI/ sederajat, dan SLB. Selanjutnya pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang SMP/MTs/ sederajat, SMA/MA/



sederajat, dan SMK. Tahap terakhir, vaksin diberikan kepada PTK pada jenjang pendidikan tinggi atau sederajat.

Agar kegiatan belajar mengajar tatap muka bisa segera dilakukan, usai vaksinasi perdana dilakukan di DKI Jakarta, vaksinasi bagi PTK ini bisa diikuti oleh provinsi-provinsi lainnya.

### Kurangi Dampak Negatif

Kebijakan vaksinasi untuk PTK diambil sebagai langkah untuk mengurangi kehilangan kemampuan dan pengalaman belajar pada siswa atau learning lost akibat pandemi Covid-19. Terutama bagi satuan pendidikan yang paling mengalami kesulitan menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ) seperti peserta didik PAUD, SD, dan SLB.

Selain itu, vaksinasi ini juga untuk mendukung akselerasi penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan jawaban agar tahun ajaran baru 2021/2022 yang akan dimulai Juli 2021

sudah bisa dilakukan belajar tatap muka secara bertahap.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan data PTK yang dijadikan basis pemberian vaksinasi. Kemendikbudristek sendiri memiliki pangkalan data PTK yaitu Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) yang selanjutnya dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Untuk mendapatkan vaksin, pendidik dan tenaga kependidikan yang terdaftar cukup membawa identitas diri ke lokasi vaksinasi yang ditentukan pemerintah daerah. Jika PTK tidak terdaftar, dapat

menyertakan surat pernyataan dari pimpinan satuan pendidikan dan membawa surat ke lokasi vaksinasi.

Selanjutnya, Kemenkes berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan vaksinasi yang paling memudahkan bagi seluruh PTK. Adapun jadwal dan lokasi vaksinasi akan diinformasikan oleh dinas kesehatan/dinas pendidikan/kantor wilayah Kemenag masing-masing daerah.

Kemendikbud terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan semua pihak-pihak terkait termasuk organisasi profesi guru dalam memberikan pelayanan vaksinasi bagi PTK. **(DNS)**

Vaksinasi PTK Diapresiasi

Sejumlah asosiasi guru dan forum pendidikan mengapresiasi program vaksinasi untuk pendidik dan tenaga kependidikan yang digagas pemerintah melalui Kemendikbud dan Kemenkes. Redaksi merangkum pernyataan apresiasi tersebut, seperti tertuang dalam grafik berikut ini.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi

Saya bangga dan berterima kasih kepada pemerintah yang telah memprioritaskan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Ini merupakan gerakan yang sangat terpuji, karena guru adalah garda terdepan supaya proses pembelajaran dapat berlangsung dan menjadi contoh bagi masyarakat untuk mau divaksin karena aman dan halal. Program ini menjadi cara untuk membangkitkan kepercayaan dan optimisme. Karena itu harus didukung secara bahu membahu agar vaksinasi ini terus berlangsung sampai bawah hingga pembelajaran dapat masuk kembali. Ini sangat menjadi harapan baru bangkitnya optimisme para guru, para pendidik formal dan nonformal dan juga tenaga kependidikan.

Sekretaris jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo

FSGI mengapresiasi kebijakan ini. Vaksinasi adalah langkah konkret pemerintah dalam menyiapkan pembelajaran tatap muka supaya lebih siap.

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Danang Hidayatullah

Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang mengusahakan vaksinasi sebagai alternatif solusi untuk memastikan tenaga pendidik lebih terlindung dari wabah penyakit. Kepada guru-guru yang sudah divaksin, testimoni dari mereka menjadi penting. Namun para pemangku kepentinganlah yang paling berperan untuk menyosialisasikan ini agar masyarakat lebih memahami kebijakan vaksinasi.

### Wakil Ketua Umum II Forum Guru IPS Seluruh Indonesia (Fogipsi Indonesia), Ade Kusdinar

Program vaksinasi ini memunculkan harapan baru terselenggaranya kembali sekolah tatap muka. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada Kemendikbud yang sudah memfasilitasi, dan ini suatu apresiasi yang sangat luar biasa bagi kami selaku guru. Insya Allah saya mewakili seluruh guru Indonesia, khususnya guru IPS.



### Perwakilan Ikatan Bimbingan dan Konseling Sekolah (IBKS), Mujiyatna

Program ini sangat bagus sekali. Saya sangat setuju dengan Mas Menteri kalau program ini dikejar sampai bulan Juni, kemudian mulailah kita mengadakan tatap muka walaupun masih protokol kesehatan, pengaturannya selang seling, atau baru menampung 50 persen siswa. Tapi intinya sudah ada tatap muka.



### Perwakilan Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT), Santi Librayanti Oktadriani

Kepala sekolah dapat menurunkan kebijakan vaksinasi ini ke lini di bawahnya. Saya yakin, jika program vaksinasi sukses dilakukan pada sektor pendidikan, maka semakin cepat pembelajaran tatap muka dapat dilakukan. Karena kita sudah merindukan tatap muka.



### Perwakilan Asosiasi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia (AGBSI), Waridin

Saya merasa lebih merasa aman dalam berinteraksi apabila telah divaksinasi karena secara teori tubuhnya telah memiliki kekebalan terhadap virus Covid-19. Semakin banyak yang mendapat vaksin semoga sebaran Covid-19 semakin terkendali dan bisa dihentikan.



### Perwakilan dari Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Laili Hadiati

Program vaksinasi ini menjadi jaminan kesehatan bagi guru-guru yang secara tidak langsung melindungi hak anak-anak peserta didiknya agar terlindungi kesehatannya selama belajar. Ini menjadi sebuah titik harapan bagi kita, karena para murid juga sudah mengalami kejenuhan. Diharapkan program vaksinasi ini dapat menjangkau seluruh guru di Indonesia sehingga akan terjamin dari virus Covid-19. Kami tetap bekerja sama dan berjejaring dengan elemen pendidikan maupun kesehatan. Walaupun secara bertahap setidaknya program ini bisa berkesinambungan, berkelanjutan, selama masa pandemi ini masih terus berjalan.



### Sekretaris Forum Guru Independen Indonesia (FGII) DPC Jakarta Barat, Esther Layas Sinuraya

Kami setuju PTK menjadi salah satu sasaran yang diprioritaskan mendapat vaksin. Itu harus punya “tameng” supaya tidak menularkan Covid-19 ke murid-murid. Selain itu, di satuan pendidikan, kepala sekolah juga berperan penting dalam menyukseskan vaksinasi. Dia bisa menjadi contoh teladan bagi ekosistem pendidikan di sekolah.



### Perwakilan Ikatan Guru Pendidikan Khusus Indonesia (IGPKhI), Herlina Kristianti

Saya meyakini, vaksinasi merupakan strategi yang diambil pemerintah dalam memperhatikan PTK selaku ujung tombak agar sehat dan selamat dalam bertugas. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan vaksin kepada orang-orang yang bekerja di bidang layanan publik termasuk sektor pendidikan. Jangan takut, jangan kuatir, vaksin adalah solusi mengalahkan pandemi. Mau selamat? Ayo divaksin!



**Majelis Nasional Pendidikan Katolik,  
Fanny Parera**

Saya turut mendukung pemberian vaksinasi bagi PTK. Saya berharap, ke depan semakin banyak PTK yang divaksinasi agar Indonesia memiliki guru yang sehat dan pembelajaran dapat berlangsung seperti sedia kala. Mari kita dukung pemerintah dalam menangani kesehatan, yang pasti kita tetap harus yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kesehatan buat kita.



**Wakil Ketua Umum Forum Guru IPS  
Seluruh Indonesia (FOGIPSI), Ade  
Kusdinar**

Kebijakan vaksinasi ini tepat sasaran dan strategis. Saya sangat bahagia dan menjadi suatu kehormatan dijadikan bagian dari program untuk menyelesaikan masalah bangsa dan dunia. Saya berharap, dengan mengikuti aturan standar penanganan dan pencegahan Covid-19 maka pembelajaran tatap muka secepatnya dapat segera dilaksanakan kembali secara aman dan nyaman bagi seluruh ekosistem pendidikan. Saya pesankan kepada para guru dan masyarakat Indonesia agar tidak ragu dan khawatir untuk divaksin dalam menyukseskan program vaksinasi ini sebagai bagian dari elemen bangsa dalam memerangi wabah Covid-19.



**Mekanisme Vaksin bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan**



**Kemdikbudristek & Kemenag Telah Menyiapkan Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan/PTK yang Dijadikan Basis Pemberian Vaksinasi**



**Jadwal & Lokasi Vaksinasi dari Dinas Kesehatan/Dinas Pendidikan/Kantor Wilayah Kemenag Masing-Masing Daerah**



**PTK Terdaftar Cukup Membawa Identitas Diri ke Lokasi Vaksinasi yang Ditentukan Pemerintah Daerah**



**PTK Terdaftar Menyertakan Surat Pernyataan dari Pimpinan ke Lokasi Vaksinasi**

*Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan vaksinasi yang paling memudahkan bagi seluruh PTK.*



Relaksasi Dana BOS

## Bisa Digunakan untuk Beli Gawai Hingga Perlengkapan Protokol Kesehatan



**Daftar periksa persiapan pembelajaran tatap muka (PTM) yang direncanakan dimulai pada Juli 2021 dipenuhi satu per satu. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sedianya telah mengalami relaksasi di awal pandemi Covid-19, direlaksasi kembali di masa persiapan PTM. Tujuannya tak lain, agar rencana pembukaan sekolah tidak terhalang kebutuhan operasional.**

Dana BOS menjadi salah satu komponen utama bagi sekolah dalam menjalankan operasional sekolah. Sebelum pandemi, BOS diberikan ke sekolah dengan peruntukan terbatas. Setelah dua kali direlaksasi di masa pandemi, penggunaan dana BOS kembali direlaksasi guna memenuhi daftar periksa yang harus dilengkapi menuju pembelajaran tatap muka.

Relaksasi dana BOS sejalan dengan upaya lain yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk membuka kembali PTM, seperti vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan, serta bantuan kuota



**Fleksibilitas yang dimaksud dalam penggunaan dana BOS ini memungkinkan sekolah untuk menggunakan dana BOS untuk pembelian gawai, perlengkapan protokol kesehatan, transportasi yang aman bagi guru dan murid, dan lain-lain**

internet yang tetap diberikan untuk mendukung pembelajaran. Pembelajaran tatap muka di bulan Juli 2021 memang masih terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat, namun hal tersebut menjadi komitmen Kemendikbudristek untuk mengurangi dampak *learning loss* akibat pandemi Covid-19.

Demi kelancaran proses tersebut, Mendikbudristek menjamin fleksibilitas penggunaan dana BOS di tahun 2021. Fleksibilitas yang dimaksud dalam penggunaan dana BOS ini memungkinkan sekolah untuk menggunakan dana BOS untuk pembelian gawai, perlengkapan protokol kesehatan, transportasi yang aman bagi guru dan murid, dan lain-lain.

Selain fleksibilitas, kepala sekolah juga diberi kebebasan untuk menentukan kebutuhan apa yang paling penting bagi sekolahnya di masa pandemi. Harapannya, satuan pendidikan langsung dapat mengambil keputusan cepat untuk mengatasi tantangan-tantangan yang sangat berbeda di tiap daerah. Kebijakan dana BOS saat ini seyogyanya digunakan untuk memfasilitasi berbagai kebijakan yang diambil satuan pendidikan dalam menyikapi perubahan dan tantangan sehubungan dengan persiapan PTM bertahap.

Dana BOS 2021 masih tetap fleksibel untuk digunakan membayar honor guru, sebab Indonesia masih dalam kondisi darurat bencana. Pada dalam kondisi normal, penggunaan dana BOS untuk honor guru dibatasi maksimal 50 persen, baik untuk sekolah negeri dan swasta.

Jika sekolah ada yang masih menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) maka jelas yang paling





**Kemendikbudristek mengubah cara perhitungan BOS dengan memegang azas afirmasi, sehingga perhitungan per anak menjadi majemuk.**

Sebelum dilakukan relaksasi, perhitungan dana BOS untuk setiap sekolah adalah seragam, di mana biaya yang didapatkan per anak adalah sama. Baik siswa yang berada di Jakarta, Yogyakarta, Papua, dan Maluku besarannya sama. Perhitungan seperti itu dirasa tidak adil bagi siswa di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di mana indeks kemahalan daerahnya lebih tinggi.



kritis adalah bagaimana untuk kembali tatap muka secara aman. Untuk itu, Kemendikbud meminta kepala dinas, kepala sekolah, dan pemerintah daerah untuk segera mengakselerasi dan menggunakan dana BOS untuk segera tatap muka.

## Berkeadilan Sosial

Kebijakan dana BOS di 2021 diutamakan agar lebih berkeadilan bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Di 2020 lalu, Kemendikbudristek telah melakukan perubahan mekanisme penyaluran dana BOS yang langsung ditransfer dari Kementerian Keuangan ke rekening sekolah. Demikian pula pelaporannya yang dapat dilakukan secara daring agar lebih praktis dan memberikan fleksibilitas kepada sekolah.

Penyaluran dana BOS yang langsung ke sekolah tersebut menerima tanggapan positif dan berhasil mengurangi tingkat keterlambatan sekitar 32 persen atau tiga minggu lebih cepat dibandingkan tahun 2019. Tentu hal ini sangat membantu para kepala satuan pendidikan dalam mengelola sekolah masing-masing, utamanya di masa awal pandemi. Sebanyak 85 persen responden sekolah dan 96 persen responden pemerintah daerah memandang penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah memudahkan atau sangat memudahkan.

Dari evaluasi tersebut, Kemendikbudristek mengubah cara perhitungan BOS dengan memegang azas afirmasi, sehingga perhitungan per anak menjadi majemuk. Artinya, di daerah indeks kemahalan tinggi seperti Papua atau Maluku atau daerah kepulauan, di mana indeks kemahalannya meningkat, per anak mendapat besaran dana BOS lebih banyak.

Dan dengan perhitungan baru ini pula, khusus untuk sekolah-sekolah di Papua, BOS-nya meningkat hampir dua kali lipat. Di Maluku, setiap sekolah mendapat peningkatan dana BOS hingga 40-50 persen. Dengan kebijakan anggaran yang benar-benar berkeadilan sosial seperti ini, harapannya dapat mendukung tingkat kualitas pembelajaran di daerah yang lebih membutuhkan.

Sebagai contoh peningkatan dana BOS yang bervariasi sesuai perbedaan karakteristik dan kebutuhan daerah, SDN YPPK Sanepa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, yang pada 2020 mendapatkan satuan biaya BOS sebesar Rp900.000, tahun ini menjadi Rp1.960.000 per siswa. Sementara, besaran alokasi BOS 2020 yang sebesar Rp159.300.000, tahun 2021 ini menjadi Rp346.920.000.(ALN)



Menjawab Respons Positif Masyarakat

# Bantuan Kuota Data Internet Dilanjutkan

**Kebijakan bantuan kuota data internet pada tahun 2020 mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat. Para peserta didik, pendidik, hingga orang tua merasa terbantu dengan adanya bantuan kuota data internet untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ). Pada tahun 2021 pemerintah pun melanjutkan kebijakan bantuan kuota data internet selama tiga bulan, yakni dari Maret hingga Mei 2021. Ada beberapa perubahan jika dibandingkan dengan kebijakan pada tahun 2020, antara lain mengenai jenis kuota dan jumlah kuota.**

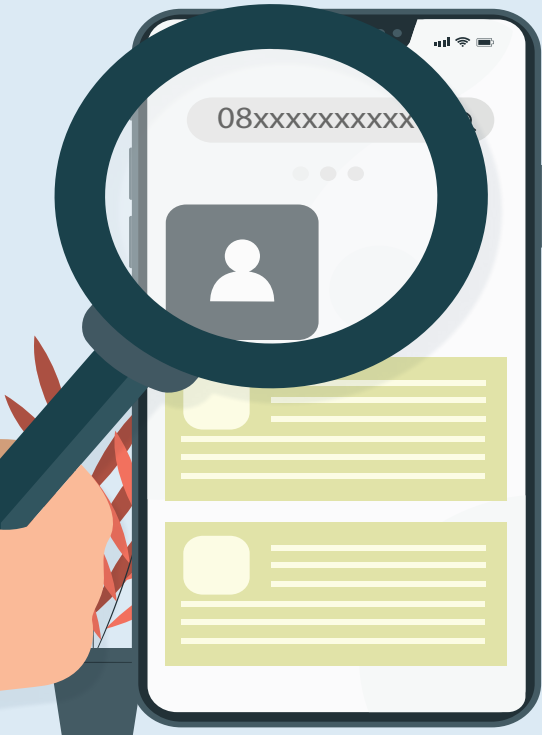
Sebelumnya pada tahun 2020, jenis kuota dibagi menjadi dua, yaitu kuota belajar dan kuota umum dengan peruntukan dan akses yang berbeda. Kini berdasarkan masukan masyarakat, keseluruhan bantuan kuota data internet di tahun 2021 merupakan jenis kuota umum. Kuota umum tersebut dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman (kecuali yang diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika) dan yang tercantum pada laman <http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id>. Kuota juga dapat digunakan untuk

mengakses Youtube, namun tetap tidak dapat mengakses platform media sosial lain, seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan Tiktok.

Jumlah kuota yang diberikan kepada penerima bantuan kuota data internet tahun 2021 juga berubah. Peserta didik PAUD mendapat 7 GB/bulan, peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 10GB/bulan, dan pendidik PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 12 GB/bulan. Kemudian mahasiswa dan dosen mendapat 15 GB/bulan. Bantuan kuota data internet akan disalurkan pada tanggal 11 s.d. 15 setiap bulan dan berlaku selama 30 hari sejak diterima.

Ada satu lagi ketentuan baru yang diberlakukan pada tahun ini, yaitu bantuan tidak akan diberikan kepada penerima bantuan pada tahun 2020 yang total penggunaan kuotanya kurang dari 1 GB. Peserta didik dan pendidik yang telah menerima bantuan kuota pada bulan November-Desember 2020 dan nomornya masih aktif otomatis akan menerima bantuan kuota pada tahun 2021, kecuali penerima bantuan pada tahun 2020 yang total penggunaan kuotanya kurang dari 1 GB.

Pemimpin satuan pendidikan tidak perlu lagi mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk penerima bantuan sudah menerima bantuan pada bulan November-Desember 2020. Namun apabila ada yang nomornya berubah atau belum menerima bantuan kuota sebelumnya, maka calon penerima harus melapor kepada pimpinan satuan pendidikan sebelum bulan April 2021 untuk mendapat bantuan



kuota. Selanjutnya, pimpinan/operator satuan pendidikan mengunggah SPTJM untuk nomor yang berubah atau nomor baru ke laman <http://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id> (untuk PAUD, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah) atau <http://pddikti.kemdikbud.go.id> (untuk jenjang pendidikan tinggi).

Merujuk pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Paket Kuota Data Internet Tahun 2021, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk menerima bantuan kuota data internet pada tahun 2021.

Untuk peserta Didik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah syaratnya harus terdaftar di aplikasi data pokok pendidikan (dapodik) dan memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik/orang tua/anggota keluarga/wali. Sedangkan untuk mahasiswa, harus terdaftar di aplikasi pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti), berstatus aktif dalam perkuliahan atau sedang menuntaskan gelar ganda (*double degree*), memiliki Kartu Rencana Studi pada semester berjalan, dan memiliki nomor ponsel aktif.

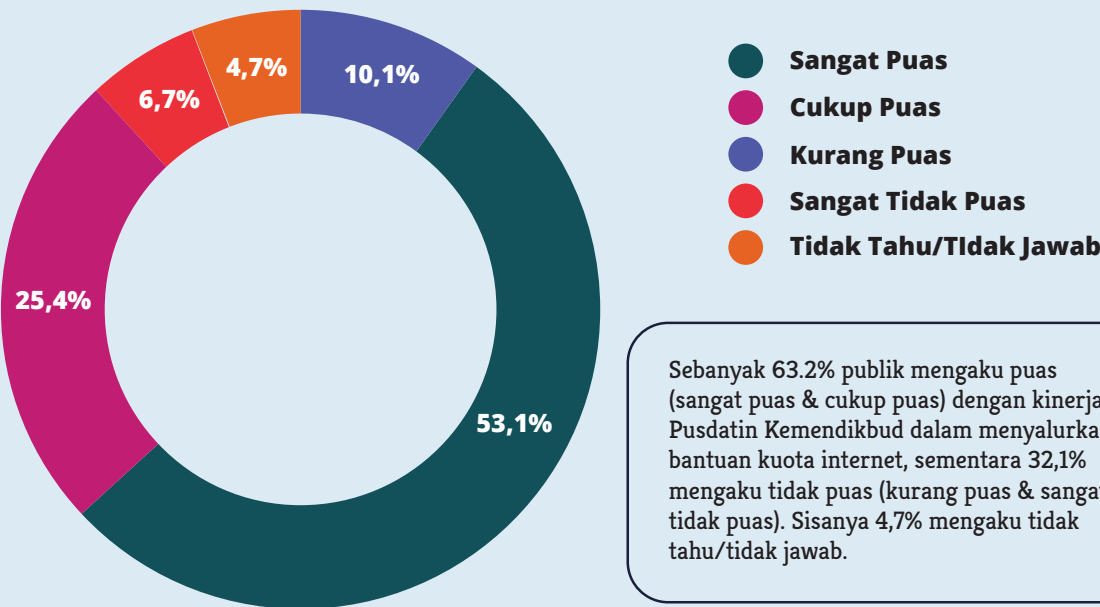
Berikutnya, syarat untuk pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah harus terdaftar di aplikasi dapodik dan memiliki nomor ponsel aktif. Kemudian untuk dosen, harus

terdaftar di aplikasi PDDikti dan berstatus aktif, memiliki nomor ponsel aktif, dan memiliki nomor registrasi, yaitu Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), dan Nomor Urut Pendidik (NUP). Informasi lebih detail tentang bantuan kuota data internet Kemendikbudristek, dapat diakses melalui situs resmi <http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id>.

Merujuk data Arus Survei Indonesia, sebanyak 84,7 persen responden menilai bahwa program bantuan kuota internet pada tahun 2020 merupakan langkah tepat dalam menjawab krisis wabah Covid-19. Selanjutnya, sebanyak 85,6 persen responden menilai bahwa program bantuan internet gratis meringankan beban ekonomi orang tua pelajar/mahasiswa dalam membeli paket internet.

Bantuan kuota data internet mendapat respons positif dari pendidik dan peserta didik. Di antaranya adalah Luh Eka Yanti, Guru SMKN 3 Singaraja Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang merasakan peningkatan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ). Hal ini membuat komunikasi antara guru, peserta didik, dan orang tua semakin baik di era pandemi. Sementara Wawan Hendrawan, siswa asal SMAN 1 Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, mengaku senang mendapat bantuan kuota internet karena memudahkannya melaksanakan pembelajaran jarak jauh. **(DES)**

Hasil Survei Bantuan Kuota Internet



Periode 7-11 Oktober 2020



**Luh Eka Yanti, Guru  
SMKN 3 Singaraja  
Kabupaten Buleleng,  
Provinsi Bali**

“Dengan bantuan ini semakin jarang guru mendapat komplain dari orang tua, peserta didik pun semakin banyak yang bisa hadir pembelajaran virtual. Terima kasih atas bantuan kuota internet yang diberikan, kini kami bisa menjalin hubungan yang lebih komunikatif antara guru dan peserta didik serta orang tua,” ungkapnya.



**Wawan Hendrawan,  
siswa SMAN 1  
Panggarangan,  
Kabupaten Lebak,  
Provinsi Banten**

“Saya senang mendapat bantuan kuota internet, sehingga saya bisa men-download video-video pembelajaran yang bisa saya putar kembali di rumah,” ujar Wawan yang hanya mendapat sinyal internet di rumah pohon miliknya.

## TANGGAPAN #SAHABATDIKBUD TERKAIT BANTUAN KUOTA DAN DATA INTERNET



**mr.aidinr** Alhamdulillah min sdh masuk 50 gb, 5gb+45gb edukasi:) semoga bisa di pakai dengan maksimal, terima kasih pak @kemdikbud.ri



2d 2 likes Reply



**udy.co** Salamin ke pa nadim..terima kasih atas bantuan kuotanya..di sekolah kami sangat membantu



18h 1 likes Reply



**putri\_mutthia** Alhamdulillah, terima kasih kuotanya sudah masuk, semoga kenaikan kalian di balas sama Allah SWT, aminn♥♥♥



2d 3 likes Reply



**\_indra\_arifanto** Admin terima kasih kuota belajarnya sudah kami terima,



1d Reply



**layzeemee @kemdikbud.ri** terimakasih kiriman quota internetnya untuk anak saya 🙏🙏



21h Reply



**fachrezaakbar** MIN KUOTA YG 35 UDAH MASUK THANK UUUU 🙏🙏



2d 3 likes Reply



**tamadio05** Alhamdulillah barusan sy dpt paket Terus Belajar free kuota edukasi gratis dari kemdikbud 35GB..trmksh 🙏



1d 7 likes Reply



**lsy\_dna @kemdikbud.ri** makasih kak admin, barusan beubah sendiri jadi 30Gb kuota belajar 5GB kuota utama. Terimakasih atas responnya, alhamdulillah bisa zoom meet dgn tenang:)



1d 1 likes Reply



**rfiqahmd** Terimakasih bantuan kuotanya @kemdikbud.ri 🙏



2d Reply



**kawaiishitaa** min makasii kuotanya ♥️🙏



1d 2 likes Reply



**leopart\_2607** Alhamdulillah, makasih @kemdikbud.ri atas bantuan kuotanya.. Kemarin udah masuk kuota adek saya.... Daerah Makassar, Sulsel.... 🙏  
Semoga kuotanya bermanfaat bagi adek saya....



1d Reply



**natanaelalven** yeay sudah dapat kuota min



1d 3 likes Reply



**bungannss** Terima kasih kemdikbud kuotanya sudah sampai



2d Reply



Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19

# Ini Dia, Alat Bantu Sekolah Terjemahkan SKB 4 Menteri

**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama dengan Kementerian Agama menerbitkan Panduan Pembelajaran bagi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah (PAUD Dikdasmen) di masa pandemi Covid-19. Panduan ini diluncurkan guna memudahkan sekolah dalam mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.**

**P**anduan ini juga sebagai respons atas masukan dari para pendidik serta orang tua yang memerlukan panduan operasional sebagai turunan dari Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Dengan panduan ini, diharapkan sekolah dapat lebih memahami cara yang perlu dilakukan dalam mempersiapkan dan melaksanakan PTM terbatas.

Panduan yang disiapkan bagi sekolah ini dapat disesuaikan dan dikembangkan berdasarkan kondisi sekolah pada daerah masing-masing. Mengingat pentingnya panduan ini dapat dipahami bersama, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim mengimbau agar dapat dipelajari dengan seksama dan diterapkan sebaik mungkin demi kebaikan semua warga sekolah dan keluarganya. Ia juga mengingatkan tentang pentingnya kolaborasi semua pihak dalam pelaksanaan PTM terbatas.

Sebelumnya, melalui SKB Empat Menteri yang dirilis pada 30 Maret 2021, pemerintah telah menetapkan

bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, kanwil, atau kantor Kemenag mewajibkan satuan pendidikan yang para guru dan tenaga pendidik sudah divaksinasi secara lengkap untuk dapat menyediakan pilihan layanan PTM terbatas bagi siswa yang orangtuanya mengizinkan.

Layanan pembelajaran jarak jauh juga wajib disediakan agar orang tua/wali dapat memilih bagi anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Bagi satuan pendidikan di daerah yang sudah ataupun dalam proses melakukan PTM terbatas walaupun pendidik dan tenaga kependidikannya belum divaksinasi tetap diperbolehkan selama mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan izin pemerintah daerah.

## Panduan Praktis

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Iwan Syahril mengungkapkan bahwa pada prinsipnya, panduan ini merupakan alat bantu untuk menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi

**Mengingat pentingnya panduan ini, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim mengimbau agar dapat dipelajari dengan seksama dan diterapkan sebaik mungkin demi kebaikan semua warga sekolah dan keluarganya.**

Covid-19. Penerima manfaat utamanya adalah guru dan tenaga kependidikan yang perlu mengontekstualisasikan panduan sesuai kondisi daerah dan satuan pendidikan.

Panduan ini terintegrasi dengan menampilkan teks utama yang didukung glosarium dan sumber belajar yang membantu pembaca memahami atau mempelajari konsep pada teks utama. Yang terpenting, panduan ini berorientasi pada murid. Artinya, pertimbangan utama dalam memilih strategi yang ditampilkan pada panduan ini adalah kebermanfaatan sebesar-besarnya bagi murid.

Diharapkan, panduan ini bisa mendorong pembelajaran yang mengantisipasi dampak negatif hilangnya pembelajaran (*learning loss*).

Panduan setebal lebih dari 100 halaman ini terdiri atas enam bagian, yaitu 1) Pendahuluan; 2) Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Pembelajaran; 3) Konsep-konsep Implementasi Pembelajaran PAUD Dikdasmen di Masa Pandemi Covid-19; 4) Pengelolaan dan Jadwal Pembelajaran di Satuan Pendidikan, serta Rencana Pelaksanaan dan Jadwal Pembelajaran Kelas/Mata Pelajaran; 5) Penjaminan Mutu Pembelajaran Pauddikdasmen di Masa Pandemi Covid-19: Pemantauan Pembelajaran dan Tindak Lanjut Pengembangan Pembelajaran; serta 6) Lampiran.

Pada bagian pendahuluan ini, dijelaskan mengenai latar belakang, tujuan, sasaran, manfaat, ruang lingkup, dan ukuran keberhasilan. Selanjutnya pada bagian kedua akan diulas terkait ketentuan pokok



## Manfaat Panduan



Adanya **arahan** untuk **penyesuaian konsep dan rencana pembelajaran** di masa pandemi Covid-19 bagi guru dan tenaga kependidikan.



Adanya **acuan** dalam **mengikuti kegiatan pembelajaran** di kelas dan satuan pendidikan bagi peserta didik dan warga satuan pendidikan.



Adanya rujukan bagi guru dan peserta didik dalam melakukan **penyesuaian pembelajaran campuran** di masa pandemi COVID-19.

Silakan unduh panduan di:

[bersamahadapikورونا.kemdikbud.go.id](https://bersamahadapikورونا.kemdikbud.go.id)  
[spab.kemdikbud.go.id](https://spab.kemdikbud.go.id)

**Pertimbangan utama dalam memilih strategi yang ditampilkan pada panduan ini adalah kebermanfaatan sebesar-besarnya bagi murid. Diharapkan, panduan ini bisa mendorong pembelajaran yang mengantisipasi dampak negative hilangnya pembelajaran (learning loss).**

penyelenggaraan pembelajaran untuk PAUD Dikdasmen di masa pandemi Covid-19, tugas dan tanggung jawab satuan pendidikan, serta ketentuan pembelajaran tatap muka terbatas dan sumber pendanaan.

Pada bagian ketiga, dijelaskan mengenai konsep, prinsip, dan strategi pembelajaran PAUD Dikdasmen di Masa Pandemi COVID-19. Selain itu, pengelolaan dan jadwal pembelajaran di satuan pendidikan, serta rencana pelaksanaan dan jadwal pembelajaran kelas/mata pelajaran juga dibahas pada bagian ini.

Pada bagian keempat, panduan menjelaskan terkait pemantauan pembelajaran dan tindak lanjut pengembangan pembelajaran. Selanjutnya untuk bagian lampiran di mana terdapat daftar tautan peraturan, daftar tautan sumber pembelajaran, dan poster pembelajaran PAUD Dikdasmen di masa pandemi Covid-19.

Sebagai bentuk sosialisasi, panduan ini dikirimkan kepada dinas pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta Kementerian/Lembaga terkait melalui surat elektronik. Panduan juga dapat diunduh di laman resmi bersamahadapikورونا. kemdikbud.go.id dan spab.kemdikbud.go.id.

Selanjutnya, panduan juga disosialisasikan pada rangkaian webinar untuk publik melalui kanal YouTube sejumlah unit kerja Kemendikbudristek dan menjadi bahan pelatihan guru secara daring melalui Guru Belajar dan Berbagi. Selain itu, panduan juga disosialisasikan pada kementerian terkait, mitra pembangunan, dinas pendidikan, kantor-kantor wilayah kementerian terkait, satuan pendidikan, organisasi pendidikan, perusahaan, dan komunitas pendidikan lainnya. **(RAN/Sumber: Siaran Pers Kemendikbudristek)**



# Tayangan *Belajar Dari Rumah*, Sarana Penunjang Pembelajaran Jarak Jauh

Sejak pandemi Covid-19 pada Maret 2020 lalu, kegiatan belajar mengajar siswa secara tatap muka tidak dapat diselenggarakan di seluruh sekolah di Indonesia. Pemerintah mengambil kebijakan tersebut guna menjaga keselamatan dan kesehatan warga sekolah di tengah pandemi Covid-19. Namun, hak belajar siswa tetap harus diutamakan dan tak boleh berhenti meski di tengah pandemi Covid-19 sehingga pemerintah mengambil langkah alternatif melalui program *Belajar dari Rumah (BDR)* yang tayang di Televisi Republik Indonesia (TVRI).

Tayangan BDR juga merupakan sarana penunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang difasilitasi pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), selain melalui berbagai *platform* pembelajaran seperti Rumah Belajar, Ruang Guru, Zenius, dan lainnya. Tayangan BDR ini juga memang ditargetkan menyasar peserta didik yang berada di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) dan daerah lainnya yang sulit mendapatkan sinyal internet untuk mengakses *platform* pembelajaran tersebut. Tak tanggung-tanggung Kemendikbudristek menggelontorkan dana sekitar Rp70 miliar untuk program BDR tersebut.

“Dalam masa yang sulit ini (pandemi Covid-19, -red) Kementerian (Kemendikbudristek, -red) melakukan berbagai macam cara untuk memastikan adanya pembelajaran dari rumah. Salah satunya melalui media televisi (TV), karena itulah program Belajar Dari Rumah ini hadir,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, beberapa waktu lalu.



**“Kami mengajak para pendidik dan peserta didik serta orang tua untuk memanfaatkan kanal atau alternatif pembelajaran yang dihadirkan oleh Kemendikbudristek”**

**-Jumeri, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek.**

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kemendikbudristek, sebanyak 60 persen peserta didik jenjang sekolah dasar (SD) dan 40 persen peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (SMP) memanfaatkan TV sebagai media pembelajaran dalam PJJ, terutama Program BDR yang ditayangkan di TVRI. Selain TVRI, Televisi Edukasi (TVE) juga menjadi salah satu alternatif bagi para siswa dan guru yang menjalani PJJ di masa pandemi Covid-19. Sejak 1 April 2021, tayangan BDR disiarkan melalui TVE milik Kemendikbudristek serta kanal Youtube Rumah Belajar dan TVE itu sendiri.

TVE juga menggandeng 12 mitra yang siap berkomitmen pada program BDR sebagai kontribusi membangun pendidikan yang baik bagi anak Indonesia. Sejumlah mitra ini terdiri dari TV lokal, jaringan, video-on-demand (VoD) ataupun over-the-top (OTT) di antaranya Vidio, Life Media, DAAI TV, TVKU Semarang, Batik TV Pekalongan, RUAI TV Pontianak, Ratih TV Kebumen, Efarina TV di Sumatera Utara, dan lainnya.

Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendikbudristek, Hasan Chabibie mengatakan, dengan beraneka sumber pembelajaran, ujunnya akan membantu proses belajar dari rumah selama pandemi. “Kini saatnya kita bersama-sama bergandengan tangan untuk memberikan masa depan yang baik untuk peserta didik di Indonesia. Ini adalah momentum bagi TV Edukasi dan mitra untuk bergandengan tangan memberi kesempatan kepada anak bangsa khususnya jenjang PAUD hingga Sekolah Dasar agar dapat belajar melalui sumber pembelajaran alternatif yang bermanfaat,” tutur Hasan.

Senada hal itu, hasil evaluasi tayangan BDR kepada 6.200 pemangku kepentingan, secara umum responden dan informan menganggap konten dan cara penyajian program BDR

**“Semoga Kemendikbudristek bisa terus memproduksi konten kreatif lewat TV Edukasi, supaya masyarakat bisa memanfaatkannya”**

**-Syarif Huda, Ketua Komisi X DPR RI.**





sudah relevan dan baik. Sebagian besar responden juga menganggap program BDR membantu guru menambah wawasan dalam mengajar dan membantu siswa memahami materi belajar.

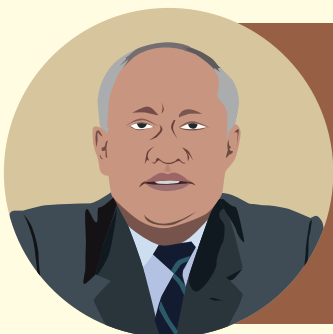
Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, Hendarman menjelaskan, para pemangku kepentingan juga merekomendasikan medium penayangan program BDR di antaranya melalui YouTube, media sosial, TVE, dan TV lokal. Alasan utama publik memilih medium tersebut, kata dia, karena bisa ditonton ulang dan mudah diakses. Lebih lanjut, Hendarman mengajak para pendidik, dan peserta didik, serta orang tua untuk senantiasa memanfaatkan program BDR melalui medium yang telah disediakan tersebut.

Guru SMP Muhammadiyah 1 Surabaya, Roro Martiningsih, mengaku sangat terbantu dengan adanya TV Edukasi, terlebih lagi tayangan BDR. “Anak-anak malah minta agar guru menjadwalkan TV Edukasi dalam pembelajaran. Kami sebagai guru bisa tenang karena kita tahu program TV Edukasi sudah melalui penyaringan, sehingga aman untuk anak-anak,” ucap Roro.

TV Edukasi menayangkan konten pendidikan secara gratis dan dapat diakses pada satelit Telkom-4 frekuensi 4125/V/5500. Agar mudah diakses masyarakat, program-program TV Edukasi juga disiarkan oleh TVRI dan berbagai TV lokal. Informasi mengenai TV Edukasi dapat diakses di laman resmi <https://tve.kemdikbud.go.id>. **(ABG)**

**Komarudin**

Rektor Universitas Negeri Jakarta



## Penerapan PTM Terbatas Harus dengan Persiapan dan Prokes Ketat

Rencana pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan kementerian lain dalam mendorong Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas telah dituangkan melalui SKB 4 Menteri. Rector Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Komarudin menegaskan PTM terbatas diperlukan, namun persiapan, ketersediaan sarana prasarana pendukung, dan protokol kesehatan ketat adalah mutlak. Berikut petikan wawancara tim redaksi Jendela dengan Guru Besar Bidang Ilmu Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini.

**B**agaimana pandangan Bapak terkait rencana Pemerintah menggelar PTM terbatas?

Menurut kami, pada tahun pelajaran 2021/2021 PTM sudah bisa dimulai secara terbatas dan bertahap dengan protokol kesehatan secara ketat. Karena faktanya, ada sekolah di daerah-daerah yang sudah melaksanakan PTM secara bergilir tiga hari belajar di sekolah, dan tiga hari belajar di rumah atau variasi lainnya, ada yang dua hari belajar di sekolah.

**Bagaimana sebaiknya penerapan protokol kesehatan (prokes) selama PTM?**

Penerapan prokes 5M PTM harus benar-benar ketat, yaitu memastikan sehat dan tidak terpapar Covid (dengan keterangan hasil tes usap antigen atau genose secara berkala), memakai masker, mencuci tangan, mengukur suhu badan, dan menjaga jarak duduk dan interaksi. Kesiapan dan kelengkapan sarana dan prasarana (saprass)

yang memadai untuk mendukung prokes juga harus menjadi perhatian penting di setiap sekolah. Sebelum PTM dilaksanakan, harus dicek benar kesiapan sarana mencuci tangan, *thermogun* atau sejenisnya, ruang isolasi atau ruang untuk isolasi, tenaga kesehatan yang memantau secara berkala, dan fasilitas lain yang diperlukan. Kesiapan kepala sekolah, guru, dan peserta didik (tendik) yang sadar prokes juga menjadi penentu pemberlakuan PTM terbatas.

**Apalagi prasyarat lainnya?**

Harus dipastikan semua unsur sekolah harus memiliki kesadaran prokes yang memadai sebelum memulai PTM terbatas. Demikian pula dengan dinas pendidikan dan perangkat pengelola pendidikan di kecamatan harus memiliki kesadaran prokes secara penuh dan sigap untuk melakukan koordinasi, agar jika terjadi kondisi darurat seperti apa pun dapat ditangani dengan baik. Begitupun satgas Covid, bagaimana koordinasinya agar tidak memunculkan klaster baru.

### **Apa peran yang perlu dilakukan Satgas Covid-19 dalam penyelenggaraan PTM?**

Satgas Covid tidak hanya melakukan koordinasi, tetapi juga harus bertindak cermat dan tegas. Terutama penentuan zona hitam, merah, oranye, kuning, atau hijau. Untuk zona hitam dan merah harus tegas untuk tidak dilakukan PTM. PTM terbatas sebaiknya diperkenankan hanya untuk zona oranye, kuning, dan hijau. Kecermatan dan ketegasan juga terhadap ketersediaan sarpras prokes di masing-masing sekolah dan sekitarnya. PTM terbatas hanya diperkenankan bagi sekolah yang sudah siap sarprasnya. Demikian juga harus memastikan pengelola sekolah, guru, dan tendik, serta orang tua harus benar-benar sadar prokes. Dalam tahap persiapan, pelaksanaan, dan pemantauan, satgas Covid harus benar-benar sigap dan rapi pengordinasiannya. Dengan ketegasan, kesigapan, kecermatan satgas Covid diharapkan dapat dihindari terjadinya kluster Covid baru.

### **Selama PJJ, muncul kekhawatiran terjadinya *loss learning*, bagaimana pandangan Bapak?**

Jelas terjadi *loss learning* selama PJJ. Sebagai seorang pendidik, *loss learning* itu sangat dirasakan sekali, terutama dari segi proses. Interaksi dan diskusi dalam PJJ jauh berkurang intensitas dan kualitasnya dibandingkan PTM. *Loss learning* ini sangat dirasakan untuk pembelajaran praktikal. Aspek *skill* menjadi berkurang drastis atau bahkan nihil. Sehingga secara keseluruhan berakibat pada menurunnya kualitas lulusan, baik pada pendidikan dasar dan menengah maupun pada pendidikan tinggi.

### **Bagaimana kesiapan guru dan sekolah agar PTM efektif dan berkualitas?**

Perlu prakondisi bagi sekolah dan guru, utamanya menyiapkan mental, penguatan pengetahuan dan pembiasaan perilaku sadar prokes, dan penyiapan sarpras prokes di sekolah. Untuk itu, perlu ujicoba pelaksanaan PTM agar kepala sekolah, guru, dan tendik tidak gagap. Jika semua komponen sekolah siap, maka pembelajaran akan berlangsung efektif dan berkualitas tanpa kekhawatiran berlebih pada peserta didik dan orang tua.

### **Bagaimana penerapan kurikulum selama PTM agar menghasilkan output yang baik?**

Kurikulum tetap menggunakan yang ada, hanya dalam pelaksanaannya lebih adaptif. Bahan ajar, media pembelajaran, sumber belajar, metode pembelajaran, dan penilaian pembelajaran diadaptasi dengan tidak mengurangi kompetensi yang ditargetkan. Karena sesungguhnya secara kurikuler, kompetensi dasar adalah kompetensi minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik. Jadi di sini, pendidik harus mampu merumuskan indikator yang mencerminkan kompetensi minimal tersebut.

### **Sejauh ini bagaimana pandangan Bapak mengenai pelaksanaan PJJ selama pandemi?**

PJJ jelas tidak bisa diharapkan berlangsung lama, karena secara proses dan hasil bisa mengurangi kualitas lulusan. Meski kita berupaya meningkatkan efektivitas pembelajaran dan belajar peserta didik, dengan berbagai strategi dan penggunaan teknologi IT, tetapi tetap belum dapat membuat proses belajar efektif seratus persen termasuk pembelajaran pada mata kuliah atau mata pelajaran teori, apalagi dalam pembelajaran praktik. Apalagi ditambah dampak psikologis pada peserta didik, orang tua siswa pada kelas-kelas rendah, termasuk di dalamnya guru dan dosen. Inilah yang mendasari perlunya PTM, baik secara hybrid atau pun *full* PTM.

### **Bagaimana jika dilakukan *blended learning* selama PTM, apakah ini efektif?**

PTM jelas akan menekan *loss learning*, karena pada PTM, interaksi belajar lebih intensif dan bermakna. Semua dimensi (intelektual, mental, emosional, sosial, dan spiritual) akan terbangun dan lebih berkembang secara optimal. Kontrol akademik, sikap, dan perilaku, bisa lebih intensif, komprehensif, langsung dan berkelanjutan. Inilah keunggulan PTM dibandingkan PJJ. Meski dalam praktik, baru dapat dilangsungkan *blended* antara PTM dan PJJ karena kondisi Covid. Tapi jika diatur dengan rapi dan baik akan dapat mengurangi *loss learning*. (S. Oebaydillah)

# Persempit Kesenjangan antara 2 Generasi Berbeda

Perkembangan teknologi khususnya internet menyebabkan terjadinya ledakan informasi yang dapat memicu munculnya inovasi-inovasi baru di semua bidang. Dengan adanya ledakan teknologi dan informasi yang sangat beragam tersebut, perlu adanya pengemasan sistem pembelajaran bagi generasi milenial yang sering disebut dengan generasi Z. Hal ini dikarenakan dunia pendidik dan peserta didik saat ini menghadapi potensi kesenjangan perspektif serta generasi Z memiliki lingkungan hidup sebagai *digital native* dengan karakteristik yang berbeda dengan generasi *baby boomers* sehingga memerlukan pembelajaran yang menarik.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, Abi Sujak menulis buku yang berjudul “Mengajar Generasi Z”. Buku ini memberikan solusi dalam mempersempit kesenjangan dari sektor pedagogik. Berdasarkan hasil dari penelitian bidang saraf otak manusia, rata-rata manusia menggunakan 6-10% dari saraf otaknya. Fenomena saraf otak yang tidak saling terkoneksi menjadi tantangan tersendiri bagi guru untuk membangkitkan interkoneksinya sehingga daya berpikir aras tinggi (*high order thinking*) pada siswa dapat ditingkatkan.

Buku ini mengulas 3 bab pembahasan, yaitu dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi, teori belajar, serta pedagogik inovatif. Penulis memberikan contoh penerapan pembelajaran inovasi yang dapat dilakukan pendidik dan orang tua dalam pembelajaran peserta didik khususnya generasi Z baik di sekolah maupun di rumah. Selain itu juga, guna memperjelas pembahasan dan membuat tulisan menjadi menarik, penulis juga menyertakan gambar-gambar ilustrasi menarik.

Buku ini tidak hanya cocok untuk guru tetapi juga

baik jika dibaca oleh orang tua. Ini karena sesuai dengan karakteristik di era *knowledge society*, pengetahuan lebih banyak tumbuh dan berkembang dalam suasana lingkungan yang bersifat informal seperti lingkungan di rumah. Selain itu, juga banyaknya muncul komunitas praktisi, komunitas seprofesi, klub profesi dapat menunjang proses belajar mengajar kepada generasi Z. Adanya berbagai komunitas tersebut juga dapat menandai Indonesia berada pada era masyarakat berpengetahuan serta mahir dalam menggunakan teknologi informasi.

Perpustakaan Dikbud kini telah memiliki koleksi elektronik dari buku ini dan dapat pembaca nikmati dengan mengunduh informasinya di tautan di bawah ini atau cukup memindai kode QR berikut. (RWT)



## Deskripsi Fisik

Judul	: <i>Mengajar Generasi Z</i>
Penulis	: Abi Sujak
Tahun Terbit	: 2020
Penerbit	: Pustaka Insan Madani
Halaman	: X, 160 hlm.
Bahasa	: Indonesia





# Pengembalian Koleksi Perpustakaan di Masa Pandemi Covid-19

## Tahapan Pengembalian Koleksi Perpustakaan di Masa Pandemi dan Kenormalan Baru

01

Pemustaka mengajukan permohonan pengembalian koleksi melalui posel ([perpustakaan@kemdikbud.go.id](mailto:perpustakaan@kemdikbud.go.id)) atau WhatsApp (082213740110) untuk menentukan jadwal pengembalian koleksi.

02

Pemustaka menginformasikan nama, nomor anggota, jumlah koleksi yang akan dikembalikan, dan kartu identitas yang ditinggalkan

03

Setelah mendapatkan informasi waktu pengembalian koleksi dari petugas, pemustaka datang ke perpustakaan untuk mengembalikan koleksi perpustakaan.

04

Proses pengembalian koleksi perpustakaan pada aplikasi dan pengecekan fisik koleksi yang dikembalikan.

05

Pemustaka menerima kartu identitas yang ditinggalkan dari petugas. (RWT)



Ustadz Jaga Jarak

## Lika Liku Berdakwah di Tengah Pandemi

**Berhadapan dengan situasi pandemi *Coronavirus Disease (Covid-19)* memang tidak mudah, tak terkecuali bagi seorang ustaz muda bernama Fahmi (diperankan oleh Alm. Ade Firman Hakim) yang terbiasa menemui umat untuk berdakwah. Berada di zona merah, Ustaz Fahmi harus menjaga jarak, beradaptasi, dan mencari cara agar tetap dapat bekerja.**

**Y**a, sosok Ustadz Fahmi, seperti yang kita alami juga saat “berkawan” dengan pandemi Covid-19. Bersama sahabatnya, Jidan Supesta (diperankan oleh Dimaz Andrean), Fahmi kemudian memutar otak agar tetap bisa mendengarkan curahan hati-curahan hati umat, sekaligus bisa mencukupi kebutuhan makan sehari-hari.

Ustadz Jaga Jarak (UJJ) merupakan kolaborasi antara Temata (Telinga Mata Nusantara) Studio dan Menjadi Manusia. Seri web ini disutradarai oleh Rahabi Mandra, Penulis Skenario Terbaik Festival Film Indonesia 2017. Dalam dua belas seri, Ustadz Jaga Jarak (UJJ) mengangkat cerita dan sudut pandang menarik dari masyarakat. Fahmi “menemui” orang-orang dengan permasalahannya masing-masing, tentu saja melalui fasilitas panggilan video atau *video call*.

Uniknya, seri web ini memang dibuat dengan memanfaatkan panggilan video karena diproduksi pada masa awal pemberlakuan karantina wilayah. Seri web ini menjadi tayangan pertama



FOTO: Tangkapan Layar Kanal Youtube - Menjadi Manusia

di Indonesia dengan proses persiapan, syuting, dan pascaproduksi dilakukan melalui telepon dan konferensi video. Dalam proses syuting jarak jauh, kamera yang digunakan juga milik para pemain itu sendiri, yang sebagian menggunakan kamera telepon pintar. Dapat ditebak, salah satu kendala yang dihadapi dalam proses syutingnya adalah masalah koneksi internet yang seringkali terputus, sehingga proses syuting harus diulang lagi.

Meskipun sudah diputar perdana di kanal YouTube pada saat bulan Ramadan 2020, namun seri web ini





FOTO: Tangkapan Layar Kanal Youtube - Menjadi Manusia

**Melalui percakapan sepanjang tayangan ini, pesan-pesan yang disampaikan tidak terkesan menggurui, namun tetap sederhana dan mengena.**

tetap hangat dan relevan untuk ditonton. Karakter Ustaz Fahmi dan Jidan yang saling bertolak belakang dan seringkali diwarnai perdebatan justru menjadi daya tarik utama UJJ. Seri ini pun dikemas dalam bentuk komedi sehingga berbagai topik yang diangkat lebih mudah diterima dan menghibur.

Dalam salah satu seri berjudul Curhatan Garda Depan misalnya, dua orang tenaga kesehatan (nakes) perempuan di sela-sela tugasnya menyempatkan “bertemu” Ustaz Fahmi dan mencurahkan kekesalannya akan sikap beberapa orang yang tidak mau menerima jenazah pasien Covid-19 untuk dikuburkan di wilayah dekat tempat tinggal mereka. Ingin rasanya nakes tersebut membalas perbuatan tersebut. Namun, Ustaz Fahmi mengingatkan agar tetap memaafkan dan ikhlas dalam bekerja.

Lucunya, Fahmi dan Jidan yang sebenarnya sedang dalam keadaan keuangan pas-pasan akhirnya bisa berbuka puasa dengan memanfaatkan voucher pembelian makanan yang dikirimkan oleh nakes sebagai bentuk donasi. Meskipun bukan berwujud makanan atau dana, tapi Fahmi tetap menerima dengan lapang hati.

Percakapan-percakapan di antara tokoh terlihat mengalir apa adanya, sesuai dengan latar belakang masing-masing tokoh. Melalui percakapan tersebut,

pesan-pesan yang disampaikan tidak terkesan menggurui, namun tetap sederhana dan mengena. Simak saja bagaimana Fahmi menghadapi nakes yang sedang kelelahan secara mental

dan fisik, anak kecil yang penasaran mengapa Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang Allah, ibu pemilik rumah makan yang resah karena masakannya tak pernah habis terjual sejak pandemi, hingga calon pejabat daerah yang dengan bujuk rayunya menginginkan Ustaz Fahmi untuk berdakwah sekaligus berkampanye untuk dirinya.

Permasalahan sehari-hari yang diangkat dalam UJJ kait-mengait dengan apa yang dialami oleh sebagian besar masyarakat saat pandemi melanda. Seri web ini membawa kita kembali pada kesederhanaan berpikir dan bersikap yang justru menjadi kekuatan saat kita dihadapkan pada kondisi serba terbatas. Namun, intinya semua sedang berjuang bersama menghadapi wabah Covid-19.

Meski sudah ditayangkan pada 2020 lalu, UJJ masih layak untuk ditonton, bahkan bersama keluarga. Walaupun tidak dalam suasana Ramadan dan terdapat perbedaan situasi, tetapi keresahan-keresahan yang sama tetap ada di tengah masyarakat dan UJJ berhasil merespons kerinduan akan jawaban dari keresahan tersebut. **(PPS)**



BIRO KERJA SAMA DAN  
HUBUNGAN MASYARAKAT

[kemdikbud.go.id](http://kemdikbud.go.id)

# Tolak Gratifikasi

**JIKA TERPAKSA MENERIMA  
LAPORKAN!**



**ZI-WBK**

**KEMENDIKBUD  
BERSIH**

Kemah Budaya Kaum Muda

## Majukan Desa dengan Inovasi

Kaum muda dinilai memiliki kemampuan kreatif-inovatif yang dapat menghasilkan terobosan untuk menjawab persoalan bangsa. Dengan potensi yang dimiliki, kaum muda diundang untuk memberikan solusi atas kebutuhan kebudayaan di era saat ini lewat Kemah Budaya Kaum Muda (KBKM). KBKM adalah platform kerja budaya yang menghimpun kaum muda untuk menjawab berbagai tantangan pemajuan kebudayaan.



## KEMAH BUDAYA KAUM MUDA



**K**aum muda yang dimaksud dalam platform ini adalah mereka yang berusia 18 s.d. 25 tahun. Tantangan pemajuan kebudayaan yang perlu dijawab itu menggunakan pendekatan STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics*) dan Revolusi Industri 4.0. Tujuannya untuk mencari inisiatif kaum muda supaya kebudayaan Indonesia siap menghadapi tantangan masa depan. Karya yang diharapkan berupa purwarupa (*prototype*) bukan produk jadi.

Lewat kerja kelompok yang beranggotakan 3-5 orang, diharapkan akan muncul berbagai inisiatif dari kalangan muda yang menjadi terobosan untuk menjawab tantangan pemajuan kebudayaan di berbagai daerah yang tertuang dalam dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Kegiatan ini dirancang untuk menggali ide, inovasi serta inisiatif berbasis STEAM dari kalangan kaum muda terkait Objek Pemajuan Kebudayaan khususnya untuk menjawab 10 permasalahan dari Daftar Masalah Umum (DMU) PPKD Kabupaten/Kota.

KBKM tahun 2021 berfokus kepada desa/lingkup administratif setingkatnya sebagai lokus objek. Setiap peserta diwajibkan memilih satu desa, di mana idenya akan diimplementasikan dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan warga desa tersebut. Dalam realisasinya, peserta juga dituntut untuk memberdayakan sumber daya yang ada di desa baik sumber daya manusia, sumber daya alam maupun finansial sebagai mitra.

Dalam tahapan KBKM nasional, peserta diwajibkan melakukan residensi (*live-in*) selama 6 s.d. 8 minggu untuk kepentingan realisasi ide. Beberapa pemangku kepentingan lain juga dirangkul untuk bersama-sama membangun ekosistem pemajuan desa berbasis budaya, sehingga KBKM diharapkan menjadi *hub* bagi kerja sinergis setiap lembaga yang punya visi sama. Beberapa instansi yang sudah diijazahi untuk sinergi kerja di antaranya adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan sektor swasta seperti Anak Teknik Indo dan beberapa instansi lain.

KBKM juga memiliki prinsip agar platform ini bersifat inklusif. Peserta yang mendaftar diharapkan memperhatikan kesetaraan gender, selain itu juga KBKM membuka akses dan kesempatan bagi penyandang disabilitas, dengan menyediakan Juru Bahasa Isyarat, asistensi Tuna

**Dalam tahapan KBKM nasional, peserta diwajibkan melakukan residensi (*live-in*) selama 6 s.d. 8 minggu untuk kepentingan realisasi ide.**

Netra dan Tuna Daksa, membuat penyesuaian aturan agar ramah disabilitas, serta membuat kriteria khusus yang mengakomodir penyandang disabilitas. Tahun 2021 tercatat ada 27 orang peserta disabilitas yang mendaftar dari total 2826 orang.

KBKM juga berupaya mengintegrasikan kegiatan ini dengan konsep Kampus Merdeka, di mana sebagian besar peserta adalah mahasiswa. Kegiatan ini nantinya dapat dikonversi ke dalam angka kredit SKS ataupun berintegrasi dengan program Magang kampus, mata kuliah

**KBKM tahun 2021 berfokus kepada desa/lingkup administratif setingkatnya sebagai lokus objek. Setiap peserta diwajibkan memilih satu desa, di mana idenya akan diimplementasikan.**

kewirausahaan ataupun Pengabdian Masyarakat yang juga bisa menjadi angka kredit bagi dosen pendamping.

KBKM adalah platform yang bukan sekadar kompetisi, namun sebuah ruang inkubasi ide dan sarana bagi anak muda untuk berperan lebih besar dalam kerja pemajuan kebudayaan. Terciptanya ekosistem pemajuan kebudayaan anak muda diharapkan menjadi stimulan sehingga cita-cita menjadi negara adidaya budaya tercapai dalam waktu singkat.

## Animo Tinggi

Keberhasilan pelaksanaan KBKM 2019 tercermin dalam angka partisipasi yang sangat tinggi. Tak kurang dari 3.508 anak muda dari 34 provinsi yang tergabung dalam 735 kelompok mendaftar sebagai peserta KBKM 2019. Setelah melalui seleksi ketat, diperoleh sejumlah 133 kelompok beranggotakan 3 s.d. 5 orang yang berasal dari 28 provinsi yang hadir di Bumi Perkemahan Prambanan sebagai peserta. Kegiatan tersebut menghasilkan 12 kelompok pemenang yang membawa pulang hadiah untuk pengembangan inisiatif mereka dan mempresentasikan hasil pengembangannya pada waktu Pekan Kebudayaan Nasional, 7 s.d. 13 Oktober 2019.

Setelahnya dilaksanakan juga KBKM 2020. Animo calon peserta tidak kalah besar dibanding pelaksanaan perdana KBKM. Tercatat 667 kelompok yang mendaftar pada dua bentuk inisiatif, yaitu aplikasi dan purwarupa. Pelaksanaan tahun 2020 dilakukan sebagian besar secara daring dikarenakan situasi pandemi, namun hal ini tidak mengurangi substansi peningkatan kapasitas peserta. KBKM di tahun tersebut dilaksanakan dua tahap, yaitu regional dan nasional mulai Agustus – Oktober 2020 dan menghasilkan 10 inisiatif aplikasi dan 10 inisiatif purwarupa. Pendampingan realisasi ide para peserta dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. (RAN)





## Kriteria dan Persyaratan KBKM 2021

Mendaftar sebagai calon peserta KBKM 2021 sangat mudah. Perhatikan kriteria dan lakukan sesuai dengan yang diminta berikut ini.

01



Setiap anggota kelompok harus berumur di antara 18 hingga 25 tahun, khusus penyandang disabilitas adalah 18 hingga 35 tahun.

02



Satu kelompok harus memiliki perpaduan unsur laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1 untuk purwarupa dan 3:2 untuk aplikasi.

03



Menandatangani surat keterangan mengikuti kegiatan dan originalitas ide.

04



Memiliki nomor ponsel aktif, prabayar, dan terkoneksi aplikasi Whatsapp.

05



Belum pernah menjadi finalis KBKM.

# Harapan dan Tantangan Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan di Indonesia

**Penerapan suatu kebijakan baru yang berdampak luas terhadap masyarakat, pasti menimbulkan berbagai tanggapan baik pro maupun kontra. Begitu juga penerapan sistem zonasi pendidikan di Indonesia, banyak yang mendukung namun tidak sedikit yang menolak.**

Pemerintah menyebutkan bahwa tujuan penerapan sistem zonasi pendidikan adalah sebagai upaya meningkatkan pemerataan pendidikan dengan mengatur penerimaan peserta didik didasarkan pada jarak sekolah dengan tempat tinggal calon peserta didik. Namun dalam implementasinya, sistem zonasi terutama pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menuai pro dan kontra yang tajam di tengah masyarakat.

Sebuah studi berjudul “Kajian Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan di Indonesia” mencoba mencari tahu mengapa terjadi perbedaan penerimaan masyarakat yang tajam terhadap sistem tersebut. Studi tersebut disusun oleh Nandy Agustin Syakarofath, Ahmad Sulaiman, dan Muhamad Faqid Irsyad dan dimuat dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 5, Nomor 2, Desember 2020. Studi tersebut bertujuan mengkaji secara komprehensif latar historis penerapan sistem zonasi di beberapa negara, tujuan, keuntungan dan tantangan, serta solusi mengatasi persoalan penerapan sistem zonasi.

Menurut peneliti, berdasarkan sejumlah literatur penerapan sistem zonasi pendidikan sudah lama diterapkan di berbagai negara. Sistem zonasi pendidikan telah diterapkan di negara-negara Eropa, Amerika, dan Asia. Negara-negara di Eropa menganggap bahwa persaingan pasar di dunia pendidikan menyebabkan persaingan yang tidak sehat antarsekolah dan membangun kasta-kasta sekolah. Sekolah-sekolah yang pada awalnya



tertinggal secara kualitas akan semakin tertinggal dan sulit menyejajarkan diri dengan sekolah lainnya. Korban dari persaingan tidak sehat antarsekolah ini adalah anak-anak dari keluarga miskin.

Penerapan sistem zonasi pendidikan di negara-negara maju berhasil meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan antardaerah sekaligus mengatasi kesenjangan kualitas antarsekolah. Belajar dari kesuksesan implementasinya di negara-negara maju, penerapan sistem zonasi pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mengatasi kesenjangan akses dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Namun penerapan sistem zonasi pendidikan ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat Indonesia.

Masyarakat yang pro dengan kebijakan zonasi berfokus pada keuntungan penerapan sistem ini yaitu terciptanya pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Pihak yang kontra kebijakan ini lebih menyoroti implementasinya di daerah yang belum optimal. Kekurangan implementasi kebijakan tersebut antara lain kurangnya kesiapan sekolah-sekolah, belum meratanya sarana dan prasarana serta kualitas guru, masalah kebijakan jalur prestasi yang dianggap belum mawadahi kebutuhan di lapangan, dan lain-lain.

Untuk memahami pro-kontra tersebut, studi ini menggunakan metode *narrative review* dengan menghimpun, membuat sintesis, dan menganalisis hasil dari berbagai sumber dan data yang relevan. Hasil kajian mengungkapkan bahwa keberhasilan pelaksanaan sistem zonasi pendidikan di negara-negara lain ditopang oleh keselarasan dengan kebijakan nasional pendidikan pendamping, seperti akselerasi pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) terutama guru.

Menurut peneliti, tantangan utama dalam penerapan kebijakan zonasi pendidikan adalah

**Belajar dari kesuksesan implementasinya di negara-negara maju, penerapan sistem zonasi pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mengatasi kesenjangan akses dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.**



kurangnya kesiapan pemangku kepentingan yang terimbas. Selain itu, penerapan sistem zonasi pendidikan di Indonesia memerlukan pembenahan utamanya dalam pelaksanaan di tingkat lokal. Solusi untuk merespon tantangan tersebut adalah dengan mengkampanyekan kebijakan sistem zonasi lebih dini dan melakukan penajaman kebijakan operasional di daerah.

Kesimpulan dari studi ini yaitu penerapan sistem zonasi pendidikan menimbulkan tanggapan positif dan negatif bagi para pemangku kepentingan pendidikan, terutama siswa, orang tua, dan guru. Agar sistem zonasi



**Hasil kajian mengungkapkan bahwa keberhasilan pelaksanaan sistem zonasi pendidikan di negara-negara lain ditopang oleh keselarasan dengan kebijakan nasional pendidikan pendamping, seperti akselerasi pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) terutama guru.**



dapat diterima masyarakat dan implementatif dalam jangka panjang, pemerintah hendaknya menerjemahkan tujuan dan sasaran kebijakan sesuai dengan kondisi lokal, mengomunikasikan kebijakan zonasi secara akurat, dan melibatkan masyarakat melakukan pemantauan dan evaluasi.

Saran dari peneliti kepada pemerintah pusat adalah mensinergikan kebijakan pembangunan di semua lini dengan sistem zonasi. Selain itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) perlu bersinergi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kemendikbud didorong terus melakukan perbaikan terutama terkait dengan implementasi sistem zonasi pendidikan di daerah. **(WID)**

*Artikel ini diambil dari kajian berjudul Kajian Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan di Indonesia oleh Nandy Agustin Syakarofath, Ahmad Sulaiman, dan Muhamad Faqid Irsyad dan dimuat dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 5, Nomor 2, Desember 2020. Apabila pembaca ingin menyimak hasil kajian secara utuh, dapat memindai kode QR berikut.*

# Ungkapan dengan Nama Hewan

**P**ernahkah Anda menggunakan ungkapan yang mengandung nama hewan di dalamnya? Misalnya saat melihat seseorang yang selalu bergerak dan tidak bisa diam, biasanya kita menggunakan ungkapan “cacing kepanasan”. Ya, konten mengenai ungkapan dengan nama hewan ini diunggah di Instagram @badanbahasa pada 3 Juni 2021 yang lalu. Ternyata ada begitu banyak ungkapan dengan nama hewan ini yang bisa kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi V. Yang tidak kalah menarik adalah komentar yang disampaikan oleh para pengikut akun media sosial ini dengan menambahkan beberapa ungkapan lainnya. Bagi yang terlupa dengan unggahan tersebut, redaksi tampilkan kembali disertai dengan contoh kalimat ketika menggunakan ungkapan tersebut. Yuk, kita simak!

## kabar >> kabar burung

kabar angin

*Menurut kabar burung, pemuda itu pergi dari rumah karena sudah tidak tahan dengan orang tuanya.*

## semut >> ke.se.mut.an

a berasa senyar (geranyam) pada anggota badan, seperti digit semut, terutama kaki dan tangan (karena lama duduk tanpa bergerak-gerak atau tertekan terlalu lama dan sebagainya)

*Karena terlalu lama bersimpuh, kakiku menjadi kesemutan.*

## babi >> membabi >> membabi buta

ki melakukan sesuatu secara nekat, tidak peduli apa-apa lagi; merawak rambang

*Angkatan udara musuh melakukan serangan membabi buta.*

## kutu >> kutu buku

ki orang yang senang membaca dan menelaah buku di mana saja

*Sita selalu membawa buku ke manapun. Tak heran ia dijuluki si kutu buku.*

## adu domba >> meng.a.du dom.ba

v menjadikan berselisih (bertikai) di antara pihak yang sepaham; menarungkan (mempertarungkan, memperlagakan) kita sama kita

*Jangan pernah mengadu domba agar kerukunan warga dapat terus terjaga.*

## nasi >> nasi kucing

nasi dengan porsi kecil, biasanya dicampur dengan tempe orek, potongan ikan atau ayam, dibungkus daun pisang, dijual di angkringan pada malam hari

*Doni sangat suka makan nasi kucing karena murah dan rasanya enak.*

## kelas >> kelas kakap

golongan atau kelompok besar (berharga, berkuasa)

*Kami tidak sanggup mengalahkan kelompok itu karena mereka termasuk dalam kelas kakap.*

Sumber: Instagram @BadanBahasaKemendikbud



# SENARAI KATA SERAPAN

Jendela edisi kali ini menyajikan daftar kata-kata dalam bahasa Indonesia yang merupakan serapan dari bahasa lainnya. Apa sajakah kata-kata tersebut? Mari simak dalam infografik berikut ini.

Bentuk Serapan	Bentuk Asal	Asal Bahasa	Arti Kata
gayat	gayah	Arab	<div><div>1.</div><div>a merasa ngeri atau pusing (seperti ketika melihat ke bawah dari tempat yang tinggi); gamang</div><div>2.</div><div>n warga dusun yang sangat miskin yang ditanggung warga lain yang bukan kerabatnya</div></div>
iwad	'iwad	Arab	<div><div>1.</div><div>n Isl imbalan atau tebusan yang diberikan istri kepada suami untuk minta khuluk</div><div>2.</div><div>n pampasan; ganti rugi</div></div>
mentalitas	menteliteic	Belanda	n keadaan dan aktivitas jiwa (batin), cara berpikir, dan berperasaan: faktor -- merupakan faktor penentu dalam pembangunan
rebewes	rijbewijs	Belanda	n surat izin mengemudi (mobil, motor)
risikan	riskant	Belanda	a besar risikonya; berbahaya
senewen	zenuwen	Belanda	<div><div>1.</div><div>a cak gugup; bingung; hilang akal</div><div>2.</div><div>a cak agak gila</div></div>
baki		Portugis	n tempat untuk menyajikan makanan dan minuman terbuat dari kayu, logam, dan sebagainya ada yang berkaki dan ada yang bertelinga; talam; nampan
pribadi	privado	Portugis	<div><div>1.</div><div>n manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri)</div><div>2.</div><div>n keadaan manusia sebagai perseorangan; keseluruhan sifat-sifat yang merupakan watak orang</div></div>
terigu	trigo	Portugis	<div><div>1.</div><div>n biji-bijian sebangsa beras (padi); gandum</div><div>2.</div><div>n tepung gandum</div></div>

(RAN)

Sumber: Senarai Kata Serapan dalam Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995

# INFORMASI KONTAK

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tetap melayani permohonan informasi dan layanan kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

## Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Saluran ULT Kemendikbudristek yang dapat diakses:

Pusat Panggilan

**177**

Posel

**[pengaduan@kemdikbud.go.id](mailto:pengaduan@kemdikbud.go.id)**

Portal

**[kemdikbud.lapor.go.id](http://kemdikbud.lapor.go.id)**

Portal

**[ult.kemdikbud.go.id](http://ult.kemdikbud.go.id)**

76<sup>TH</sup>



# SELAMAT HARI ANAK NASIONAL

24 Juli 2021

ANAK TERLINDUNGI, INDONESIA MAJU

